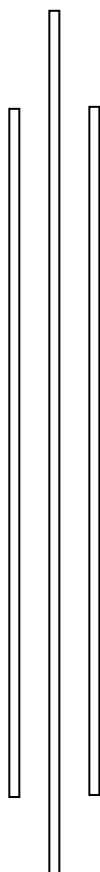




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
TAHUN ANGGARAN 2013
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2013

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	1
Laporan Realisasi Anggaran	3
Neraca	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	6
- BAB I Pendahuluan	6
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Program Pencapaian Target Kinerja	10
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	12
- BAB IV Kebijakan Akuntansi	17
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	31
Lampiran – lampiran	64

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Blitar, Januari 2014

Kepala SKPD Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Blitar



Ir. HARPRIYANTO NUGROHO,MM

NIP. 19601127 199202 1 001

SKPD DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN KAB. BLITAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- 2) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan dengan pilihan program dan kegiatan dikosongkan (untuk laporan belanja langsung dan tidak langsung) per 31 Desember 2013;
- 3) Laporan Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan (per 31 Desember 2013)

SKPD DINAS PU BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BLITAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN BLITAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan tahun 2013 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2013 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 260.317.660,00 mencapai 104.09 % dari anggarannya.

Realisasi belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 213.972.840.085 atau mencapai 104.41 % dari anggarannya.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2013 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 886.103.698.956 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 8.353.687.600, investasi jangka panjang sebesar Rp. 0 aset tetap sebesar Rp. 862.545.835.256, dana cadangan Rp.0 dan aset lainnya sebesar Rp.15.204.176.100

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp.0 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.0, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 886.103.698.956 yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 8.353.687.600 ekuitas dana investasi sebesar Rp. 877.750.011.356, dan ekuitas dana cadangan sebesar Rp.0

c. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 3/E);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 42/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penambahan Lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/A);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 38/A);

1.3. Usur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2013 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca; dan
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. (dihapus jika tidak punya pendapatan)

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2013, SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar mempunyai 14 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- g. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- h. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Kebinamargaan
- i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
- j. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- k. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- l. Program Pengendalian Banjir
- m. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- n. Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

SKPD dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 secara keseluruhan sebesar Rp 204.933.236.161, 00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	250.093.900,00
2	Belanja Operasi (sesuai di Laporan Simda)	81.019.153.731,00
3	Belanja Modal (sesuai di Laporan Simda)	123.914.082.430,00
	Surplus/(Defisit)	(204.683.142.261,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar berdasarkan kepada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2013 Nomor 34 tanggal 11 Oktober 2013 sebesar Rp.204.683.142.261,00 terdiri dari Anggaran Belanja sebesar Rp.204.933.236.161,00 dan Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 250.093.900,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar selama tahun 2013 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} \times 100$
1	Pendapatan			
	- Pendapatan Asli Daerah	250.093.900,00	260.317.660,00	104,09
	-Retribusi pemakaian tanah asset daerah lainnya	22.000.000,00	22.067.660,00	100,30
	- Retribusi peralatan lainnya	27.500.000,00	27.370.0000,00	99,52
	-Retribusi walles	176.000.000,00	186.150.000,00	105,76
	-Retribusi alat berat	24.593.900,00	24.730.000,00	100,55
2	Belanja	204.933.236.161,00	213.972.840.085,00	104,41
	- Belanja Operasi	81.019.153.731,00	83.866.694.215,00	103,51
	- Belanja Modal	123.914.082.430,00	130.106.145.870,00	104,99
	- Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit)	(204.683.142.261,00)	(213.712.422.425,00)	104,41

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian pendapatan daerah mencapai tahun 2013 mencapai hasil 104,09 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dicapai dari hasil penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal yaitu sebesar Rp.260.317.660,00 dari target sebesar Rp.250.093.900,00 atau 104,09 persen.

3.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2013 sebesar Rp.213.972.740.085 atau 104,41 persen, dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sebesar Rp.0,00 atau 0,00 persen yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	377.900.000,00	375.062.817,00	
	Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	377.900.000,00	375.062.817,00	99,22
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.904.652.000,00	1.845.892.495,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.904.652.000,00	1.845.892.495,00	96,91
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	290.000.000,00	280.888.500,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	290.000.000,00	280.888.500,00	96,85
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	316.734.000,00	313.428.050,00	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	316.734.000,00	313.428.050,00	98,95
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	6.500.000.000,00	6.313.852.200,00	
	Pembangunan jalan	6.500.000.000,00	6.313.852.200,00	97,13
6.	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	57.049.463.250,00	56.477.265.550,00	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	9.520.000.000,00	9.321.493.050,00	97,91
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	3.430.000.000,00	3.393.903.200,00	98,94
3	Pemeliharaan berkala jalan	14.620.550.000,00	14.525.756.300,00	99,35

4	Peningkatan jalan kabupaten Blitar	18.485.500.000,00	18.271.234.450,00	98,84
5	Pemeliharaan jalan dan jembatan DAK dan pendamping DAK 2013	9.493.413.250,00	9.466.085.100,00	99,71
6	Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan (DBHCT)	1.500.000.000,00	1.498.793.450,00	99,91
7.	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	735.000.000,00	732.513.400,00	
	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	735.000.000,00	732.513.400,00	99,66
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.478.000.000,00	1.403.300.775,00	
1	Pengadaan alat-alat berat	1.100.000.000,00	1.097.394.075,00	99,76
2	Penunjang pengadaan tanah pelurusan jalan Brongkos-Karangates	378.000.000,00	305.906.700,00	80,93
9.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	5.214.749.250,00	12.976.910.900,00	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK dan pendamping DAK 2013)	5.214.749.250,00	5.198.817.000,00	99,69
*2	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (Bantuan Keuanagan Propinsi)	0,00	3.888.399.900,00	0
*3	Rehabilitasi jaringan irigasi (Bantuan Propinsi)	0,00	3.889.694.000,00	0
10.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	18.620.128.000,00	18.286.577.000,00	
1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	3.445.600.000,00	3.394.210.000,00	98,51
2	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa	2.000.000.000,00	1.887.386.000,00	94,37
3	Pemeliharaan berkala prasarana pengambilan dan saluran pembawa	7.424.528.000,00	7.334.717.000,00	98,79
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (DBHCHT)	4.800.000.000,00	4,721.259.000,00	98,36
5	Peningkatan distribusi penyediaan air baku (DBHCHT)	950.000.000,00	949.005.000,00	99,90
11.	Program pengembangan,	500.000.000,00	491.405.800,00	

	Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya			
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	500.000.000,00	491.405.800,00	98,28
12.	Program Pengendalian Banjir	4.000.000.000,00	3.919.111.600,00	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	4.000.000.000,00	3.919.111.600,00	97,98
13.	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	23.245.979.930,00	23.113.498.050,00	
1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	8.200.000.000,00	8.096.942.950	98,74
2	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan (Bantuan Keuangan Propinsi)	15.045.979.930,00	15.016.555.100,00	99,80
13	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	76.673.283.236,00	79.449.142.600,00	
1	Pembangunan/pengembangan PJU dan jaringan listrik desa/dusun	3.648.312.000,00	3.542.958.000,00	97,11
2	Pembangunan infrastruktur jaringan listrik perdesaan	2.226.688.000,00	2.200.364.000,00	98,82
3	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Wilayah Kesamben Sutojayan)	21.251.783.236,00	21.059.088.000,00	99,09
4	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Wilayah Wlingi)	24.995.070.000,00	24.636.479.950,00	98,57
5	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan (Wilayah Garum)	24.551.430.000,00	24.082.416.250,00	98,09
*6	Pembangunan dan pemeliharaan jalan perdesaan (Bantuan Keuangan Propinsi)	0,00	3.927.836.400,00	0
	Jumlah	196.905.889.666,00	205.978.749.737,00	

**Penjelasan atas kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun, Rehabilitasi jaringan irigasi (Banprop) dan Pembangunan dan pemeliharaan jalan perdesaan terjadi karena adanya pergeseran anggaran setelah PAK tentang Peraturan Bupati No 41 Tahun 2013 Tanggal 15 Nopember 2013*

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA

Secara umum berapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain :

- a. Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- c. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
- d. Belum samanya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah dan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

d. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut.

1) **Persediaan**

Persediaan disajikan sebesar:

- a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2) **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, investasi jangka panjang baik permanen maupun nonpermanen dicatat sebesar biaya perolehan. Untuk surat berharga tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Sedangkan Investasi jangka pendek non saham dicatat sebesar nilai nominalnya.

3) **Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

4) **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

5) **Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

6) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

7) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar saham. Arus ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penambahan Lampiran atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 42 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Terkait dengan Peraturan Bupati tersebut maka dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Blitar tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar, namun ada beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain:

a. Pengakuan

Pengakuan aset tetap sesuai nilai perolehannya, pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Kewajiban sesuai dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

b. Kapitalisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Batasan Minimal Kapitalisasi aset dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013.

c. Penyusutan

Pemerintah Kabupaten Blitar belum menerapkan penyusutan aset tetap dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2013, dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
a. Aset		886.103.698.956,00	759.794.992.766,00
	Saldo Aset SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 886.103.698.956,00 dengan rincian sebagai berikut.		

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(1)	Aset Lancar	8.353.687.600,00	16.357.933.000,00
(2)	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
(3)	Aset Tetap	862.545.835.256,00	728.247.358.666,00
(4)	Dana Cadangan	0,00	0,00
(5)	Aset Lainnya	15.204.176.100,00	15.189.701.100,00
Jumlah Aset		886.103.698.956,00	759.794.992.766,00

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
1) Aset Lancar		8.353.687.600,00	16.357.933.000,00

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Pu Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 8.353.687.600,00, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Kas	0,00	0,00
(b)	Piutang Retribusi	0,00	0,00
(c)	Piutang lain-lain	0,00	0,00
(d)	Persediaan	8.353.687.600,00	16.357.933.000,00
Jumlah		8.353.687.600,00	16.357.933.000,00

		31 Desember 2013	31 Desember 2012
		(Rp)	(Rp)
(a) Kas		0,00	0,00

Saldo Kas SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 terdiri atas:

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
(1)	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
(2)	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
--	--

(b) Piutang Retribusi **0,00** **0,00**

Saldo Piutang Retribusi SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00 terdiri dari ... dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
Jumlah		0,00

31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
--	--

(c) Piutang lain-lain **0,00** **0,00**

Saldo piutang lain-lain SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00, terdiri dari:

No	Jenis	Nilai (Rp)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
Jumlah		0,00

31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
--	--

(d) Persediaan **0,00** **0,00**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di SKPD Dinas Pu Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar. yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 8.353.687.600,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO	URAIAN	NILAI (Rp.)
(1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	2.824.600,00
(2)	Amplop	41.000,00
(3)	Persediaan Barang Bantuan Modal Jalan Jaringan, Instalasi	8.350.822.000,00
Jumlah		8.353.687.600,00

31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
--	--

2) Investasi Jangka Panjang **0,00** **0,00**

Saldo Investasi jangka Panjang SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar nihil.

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
3) Aset Tetap	862.545.835.256,00	728.247.358.666,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 728.247.358.666,00 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 862.545.835.256,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)
(a)	Tanah	30.817.709.200,00	30.817.709.200,00
(b)	Peralatan dan Mesin	11.804.832.890,00	9.374.219.500,00
(c)	Gedung dan Bangunan	3.987.158.000,00	3.641.777.000,00
(d)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	815.174.479.466,00	684.344.180.966,00
(e)	Aset Tetap Lainnya	69.472.000,00	69.472.000,00
(f)	Kontruksi dalam Pengerjaan	692.183.700,00	0,00
Jumlah Aset		862.545.835.256,00	728.247.358.666,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 134.298.476.590,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (Rp. 862.545.835.256,00-Rp. 728.247.358.666,00) dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2012</u> <u>(Rp)</u>
(a) Tanah	30.817.709.200,00	30.817.709.200,00

Saldo Tanah SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp 30.817.709.200,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Tanah Kantor	Rp.	2.179.854.250,00
Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	586.040.000,00
Tanah Sarana Umum Taman	Rp.	2.834.973.600,00
Tanah Perumahan	Rp.	5.907.768.400,00
Tanah Petanian	Rp.	9.142.686.000,00
Tanah Perkampungan	Rp.	7.397.109.600,00
Tanah Lain-lain	Rp.	2.769.277.350,00
Jumlah	Rp.	30.817.709.200,00
Penambahan		
Tanah	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi		
Tanah ...	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Penghapusan/Pengurangan		
Tanah ...	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	(0,00)
Saldo akhir		
Tanah Kantor	Rp.	2.179.854.250,00
Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	Rp.	586.040.000,00
Tanah Sarana Umum Taman	Rp.	2.834.973.600,00
Tanah Perumahan	Rp.	5.907.768.400,00
Tanah Petanian	Rp.	9.142.686.000,00

Tanah Perkampungan	Rp.	7.397.109.600,00
Tanah Lain-lain	Rp.	2.769.277.350,00
Jumlah	Rp.	30.817.709.200,00)

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	11.804.832.890,00	9.374.219.500,00

Saldo peralatan dan mesin SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 11.804.832.890,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Traktor	Rp. 96.000.000,00
Buldozer	Rp. 1.180.000.000,00
Stoom Wals	Rp. 2.932.905.000,00
Eskavator	Rp. 1.015.782.000,00
Stamper	Rp. 60.000.000,00
Generator Set	Rp. 16.000.000,00
Mesin Pompa Air	Rp. 3.200.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp. 399.730.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truk	Rp. 1.498.963.700,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pickup	Rp. 212.972.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp. 282.125.100,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan	Rp. 567.050.000,00
Alat-alat Bengkel Mesin Dongkrak	Rp. 4.950.000,00
Alat-alat Bengkel Lainnya	Rp. 75.075.000,00
Alat-alat pengemasan Pertanian/Peternakan	Rp. 2.400.000,00
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp. 19.160.000,00
Peralatan Kantor Mesin Hitung	Rp. 980.000,00
Peralatan Kantor Mesin Cetak	Rp. 12.000.000,00
Peralatan Kantor Papan Tulis Elektronik	Rp. 2.520.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp. 20.235.839,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp. 96.891.000,00
Perlengkapan Kantor Brankas	Rp. 10.800.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp. 26.562.500,00
Air Conditioner (AC)	Rp. 6.080.000,00
Kipas Angin	Rp. 600.000,00
Komputer PC	Rp. 209.817.000,00
Komputer Laptop	Rp. 136.855.545,00
Printer	Rp. 38.437.939,00
Scanner	Rp. 1.500.000,00
Monitor/Display	Rp. 1.700.000,00
UPS/Stabilizer	Rp. 2.800.000,00
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp. 11.717.025,00
Meja kerja	Rp. 79.135.200,00
Meja rapat	Rp. 28.373.000,00
Meja makan	Rp. 0,00
Kursi kerja	Rp. 62.765.000,00
Kursi rapat	Rp. 39.665.000,00
Sofa	Rp. 9.900.000,00
Rak buku/tv/kembang	Rp. 7.990.000,00
Podium	Rp. 2.600.000,00
Dispenser	Rp. 120.000,00
Kulkas	Rp. 0,00

Jam dinding/meja	Rp.	80.000,00
Korden	Rp.	120.000,00
TV	Rp.	1.400.000,00
AC	Rp.	38.500.000,00
Kamera	Rp.	60.386.246,00
Handycam	Rp.	6.750.000,00
Proyektor	Rp.	56.390.000,00
Amplifier/Mixer Audio	Rp.	21.494.406,00
Telepon	Rp.	1.549.000,00
Faximili	Rp.	1.200.000,00
Teodolite	Rp.	184.000,00
Alat GPS	Rp.	9.750.000,00
Aiat-slat laboratorium kimia	Rp.	58.000,00
Jumlah	Rp.	9.374.219.500,00
Penambahan		
Stoom Wals	Rp.	1.097.394.075,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp.	333.600.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pickup	Rp.	378.789.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp.	447.457.995,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp.	49.610.000,00
Komputer PC	Rp.	17.600.000,00
Komputer Laptop	Rp.	120.625.000,00
Printer	Rp.	5.940.000,00
Jumlah	Rp.	2.478.296.070,00
Penyesuaian/Koreksi		
Stoom Wals	Rp.	(187.878.055,00)
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pickup	Rp.	154.670.375,00
Komputer Laptop	Rp.	(14.475.000,00)
Jumlah	Rp.	(47.682.680,00)
Penghapusan/Pengurangan		
...	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
Saldo akhir		
Traktor	Rp.	96.000.000,00
Buldozer	Rp.	1.180.000.000,00
Stoom Wals	Rp.	3.842.421.020,00
Eskavator	Rp.	1.015.782.000,00
Stamper	Rp.	60.000.000,00
Generator Set	Rp.	16.000.000,00
Mesin Pompa Air	Rp.	3.200.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Rp.	733.330.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truk	Rp.	1.498.963.700,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pickup	Rp.	746.431.375,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	Rp.	729.583.095,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangga Berjalan	Rp.	567.050.000,00
Alat-alat Bengkel Mesin Dongkrak	Rp.	4.950.000,00
Alat-alat Bengkel Lainnya	Rp.	75.075.000,00
Alat-alat pengemasan Pertanian/Peternakan	Rp.	2.400.000,00
Peralatan Kantor Mesin Tik	Rp.	19.160.000,00
Peralatan Kantor Mesin Hitung	Rp.	980.000,00
Peralatan Kantor Mesin Cetak	Rp.	12.000.000,00
Peralatan Kantor Papan Tulis Elektronik	Rp.	2.520.000,00
Peralatan Kantor Papan Visual Elektronik/OHP/LCD	Rp.	20.235.839,00
Perlengkapan Kantor Almari	Rp.	146.501.000,00

Perlengkapan Kantor Brankas	Rp.	10.800.000,00
Perlengkapan Kantor Filling Kabinet	Rp.	26.562.500,00
Air Conditioner (AC)	Rp.	6.080.000,00
Kipas Angin	Rp.	600.000,00
Komputer PC	Rp.	227.417.000,00
Komputer Laptop	Rp.	243.005.545,00
Printer	Rp.	44.377.939,00
Scanner	Rp.	1.500.000,00
Monitor/Display	Rp.	1.700.000,00
UPS/Stabilizer	Rp.	2.800.000,00
Kelengkapan Komputer (Flashdisk, Mouse, Keyboard, Eksternal Hardisk dll)	Rp.	11.717.025,00
Meja kerja	Rp.	79.135.200,00
Meja rapat	Rp.	28.373.000,00
Kursi kerja	Rp.	62.765.000,00
Kursi rapat	Rp.	39.665.000,00
Sofa	Rp.	9.900.000,00
Rak buku/tv/kembang	Rp.	7.990.000,00
Podium	Rp.	2.600.000,00
Dispenser	Rp.	120.000,00
Jam dinding/meja	Rp.	80.000,00
Korden	Rp.	120.000,00
TV	Rp.	1.400.000,00
AC	Rp.	38.500.000,00
Kamera	Rp.	78.426.246,00
Handycam	Rp.	6.750.000,00
Proyektor	Rp.	56.390.000,00
Amplifier/Mixer Audio	Rp.	21.494.406,00
Telepon	Rp.	1.549.000,00
Faximili	Rp.	1200.000,00
GPS	Rp.	9.240.000,00
Teodolite	Rp.	184.000,00
Alat GPS	Rp.	9.750.000,00
Aiat-slat laboratorium kimia	Rp.	58.000,00
Jumlah	Rp	11.804.832.890,00

➤ Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2013 sebesar Rp. 2.430.613.390,00 berasal dari:

- ❖ Belanja Modal sebesar Rp2.478.296.070,00;
- ❖ Penyesuaian Belanja sebesar (Rp47.682.680,00)

	31 Desember 2013	31 Desember 2010
	(Rp)	(Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	3.987.158.000,00	3.641.777.000,00

Saldo gedung dan bangunan SKPDDinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 3.987.158.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Gedung Kantor	Rp. 3.109.603.500,00
Bangunan Menara	Rp. 24.411.500,00
Bangunan Garasi	Rp. 47.390.000,00
Bangunan Bengkel	Rp. 335.160.000,00
Bangunan Pagar	Rp. 125.212.000,00

	Jumlah	Rp. 3.641.777.000,00
Penambahan		
Bangunan Tempat Parkir		Rp. 198.194.000,00
Bangunan Paving Halaman		Rp. 147.187.000,00
	Jumlah	Rp. 345.381.000,00
Penyesuaian/Koreksi		
...		Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 0,00
Penghapusan/Pengurangan		
Bangunan...		Rp. 0,00
	Jumlah	Rp (0,00)
Saldo akhir		
Gedung Kantor		Rp. 3.109.603.500,00
Bangunan Menara		Rp. 24.411.500,00
Bangunan Garasi		Rp. 47.390.000,00
Bangunan Bengkel		Rp. 335.160.000,00
Bangunan Paving halaman		Rp. 147.187.000,00
Bangunan Pagar		Rp. 125.212.000,00
Bangunan Tempat Parkir		Rp. 198.194.000,00
	Jumlah	Rp. 3.987.158.000,00

➤ Penambahan Gedung dan Bangunan tahun 2013 sebesar Rp. 345.381.000,00 berasal dari:

❖ Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 345.381.000,00;

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2010</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
(d) Jalan, Jaringan dan Instalasi	815.174.479.466,00	684.344.180.966,00

Saldo jalan, jaringan dan instalasi SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 815.174.479.466,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Jalan Kabupaten	Rp. 481.781.243.501,00
Jembatan Gantung	Rp. 7.878.875.200,00
Jembatan Penyeberangan Orang	Rp. 1.519.165.000,00
Jembatan Penyeberangan di Atas Air	Rp. 36.702.866.225,00
Jaringan Irigasi	Rp. 137.269.356.840,00
Pintu Air	Rp. 1.113.104.000,00
Lampu Hias Jalan	Rp. 451.317.000,00
Instalasi Listrik	Rp. 17.628.253.200,00
	Jumlah Rp. 684.344.180.966,00
Penambahan	
Jalan Kabupaten	Rp. 86.438.549.000,00
Jalan Lainnya	Rp. 49.138.000,00
Jembatan Gantung	Rp. 3.393.803.200,00
Jaringan Irigasi	Rp. 35.674.005.300,00
Instalasi Listrik	Rp. 5.743.322.000,00
	Jumlah Rp. 131.298.817.500,00
Penyesuaian/Koreksi	
Jalan Kabupaten	Rp. (337.927.000,00)
Jaringan Irigasi	Rp. (130.592.000,00)
	Jumlah Rp. (468.519.000,00)
Penghapusan/Pengurangan	
Jalan ...	Rp. 0,00
	Jumlah Rp (0,00)
Saldo akhir	

Jalan Kabupaten	Rp.	567.881.865.501,00
Jalan Lainnya	Rp.	49.138.000,00
Jembatan Gantung	Rp.	11.272.678.400,00
Jembatan Penyeberangan Orang	Rp.	1.519.165.000,00
Jembatan Penyeberangan di Atas Air	Rp.	36.702.866.225,00
Jaringan Irigasi	Rp.	172.812.770.140,00
Pintu Air	Rp.	1.113.104.000,00
Lampu Hias Jalan	Rp.	451.317.000,00
Instalasi Listrik	Rp.	23.371.575.200,00
Jumlah	Rp	815.174.479.466,00

- Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2013 sebesar Rp . 131.298.817.500,00 berasal dari Belanja Modal sebesar Rp. 127.321.843.100, Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.976.974.400,00. Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa merupakan atribusi untuk memperoleh Aset tersebut;
- Penyesuaian senilai (468.519.000) dengan rincian Rp 337.927.000 dari jalan kabupaten dan Rp. 130.592.000 dari jaringan irigasi

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
(e) Aset Tetap Lainnya	69.472.000,00	69.472.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 sebesar Rp.69.472.000,00 dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Buku dan Kepustakaan	Rp. 52.000,00
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp. 0,00
Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp. 69.420.000,00
Jumlah	Rp. 69.472.000,00
Penambahan	
Buku dan Kepustakaan	Rp. 0,00
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp. 0,00
Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
Penyesuaian/Koreksi	
Buku dan Kepustakaan	Rp. 0,00
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp. 0,00
Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00
Penghapusan/Pengurangan	
Buku dan Kepustakaan	Rp. (0,00)
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp. (0,00)
Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp. (0,00)
Jumlah	Rp (0,00)
Saldo akhir	Rp 0,00
Buku dan Kepustakaan	Rp. 52.000,00
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp. 0,00
Hewan, Ternak dan Tanaman	Rp. 69.420.000,00
Jumlah	Rp. 69.472.000,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan	692.183.700,00	0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 692.183.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Belanja modal Penunjang pengadaan tanah pelurusan jalan Brongkos-Karangates Rp. 305.906.700
- ❖ Belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan jalan tahun 2014 sebesar Rp. 337.927.000,00
- ❖ Belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan jaringan irigasi tahun 2014 sebesar Rp. 48.350.000,00

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
4) Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2013 sebesar nihil

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
5) Aset Lainnya	15.204.176.100,00	15.189.701.100,00

Komposisi dan nilai saldo Aset Lainnya SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 15.189.701.100 dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp15.204.176.100,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
(a)	Aset Tak berwujud	14.475.000,00	0,00
(b)	Aset Lain-lain	15.189.701.100,00	15.189.701.100,00
Jumlah Aset		15.204.176.100,00	15.189.701.100,00

Sedangkan mutasi penambahan dalam Tahun Anggaran 2013 sebesar 14.475.000,00 diperoleh dari jumlah total aset tahun 2013 yang dikurangi dengan jumlah total aset tahun 2012 (Rp15.204.176.100,00-Rp15.189.701.100,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2010</u> (Rp)
(a) Aset Tak Berwujud	14.475.000,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp14.475.000,00 merupakan web site dengan perincian sebagai berikut.

Saldo awal		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
.....	Rp.	0,00
Jumlah		Rp. 0,00
Penambahan		
Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
.....	Rp.	0,00

	Jumlah	Rp.	0,00
Penyesuaian/Koreksi			
Aset Tidak Berwujud		Rp.	14.475.000,00
.....		Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	14.475.000,00
Penghapusan/Pengurangan			
Aset Tidak Berwujud		Rp.	(0,00)
.....		Rp.	(0,00)
	Jumlah	Rp	(0,00)
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>		Rp	<i>0,00</i>
<i>Keterangan lain (jika ada)</i>		Rp	<i>(0,00)</i>
Saldo akhir		Rp	14.475.0000,00

Penambahan Aset Tak Berwujud (*jika ada*) sebesar Rp14.475.000,00 terdiri dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 14.475.000,00 dan

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2010</u>
	(Rp)	(Rp)
(b) Aset Lain-lain	15.189.701.100,00	15.189.701.100,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 15.189.701.100,00, terdiri dari *Aset Tetap yang akan dihibahkan kepada masyarakat namun belum dihapusbukukan sebesar Rp. 15.189.701.100,00*, dengan rincian sebagai berikut.

Saldo awal	
Jalan Kabupaten	Rp. 15.189.701.100,00

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	(Rp)	(Rp)
b. Kewajiban	0,00	0,78

Saldo Kewajiban SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2013 adalah sebesar (*jika ada/ jika tida ada ditulis nihil*) Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut

	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,78

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp0,78 dan 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00. Jumlah utang jangka pendek tersebut merupakan utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan utang jangka pendek lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	0,00
(b)	0,00
(c)	0,00
Jumlah Hutang		0,00

*Mutasi utang sebesar Rp. 0,78 berdasar surat dari pihak III tentang pengikhlasan hutang sebesar Rp. 0,78.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
2) Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
c. Ekuitas Dana	886.103.698.956,00	759.794.992.765,22,00

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar. meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL) dan Ekuitas Dana Investasi (EDI). Ekuitas Dana per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 886.103.698.956,00 dengan rincian sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1) Ekuitas Dana Lancar	8.353.687.600,00	16.357.932.999.22

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 8.353.687.600,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Cadangan Piutang	0,00
(b)	Cadangan Persediaan	8.353.687.600,00
(c)	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
(d)	0,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		8.353.687.600,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
2) Ekuitas Dana Investasi	877.750.011.356,00	743.437.059.766,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas PU Bina Marga Pengairan Kabupaten Blitar yang berasal dari selisih Investasi Jangka Panjang ditambah Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 877.750.011.356,00 sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai (Rp)
(a)	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00
(b)	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	862.545.835.2560,00
(c)	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	15.204.176.100,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		877.750.011.356,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
3) Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00

Saldo akun ini merupakan kekayaan SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar yang dicadangkan, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0,00.

2. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
a. Pendapatan	260.317.660,00	220.058.810,00

Pendapatan meliputi semua penerimaan SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Anggaran dan realisasi dalam Tahun Anggaran 2013 serta realisasi Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut.

No	Pendapatan Daerah	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
(1)	Pendapatan Asli Daerah	250.093.900,00	260.317.660,00	220.058.810,00
	- Retribusi pemakaian tanah asset lainnya	22.000.000,00	22.067.660,00	10.458.810,00
	- Retribusi peralatan lain-lainya	27.500.000,00	27.370.000,00	25.080.000,00
	- Retribusi Walles	176.000.000,00	186.150.000,00	163.000.000,00
	-Retribusi alat berat	24.593.900,00	24.730.000,00	21.520.000,00
(2)	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		250.093.900,00	260.317.660,00	220.058.810,00

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
b. Belanja	213.972.740.085,00	129.579.589.436,00

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Dalam tahun 2013 SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar tersebut merupakan pengguna anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2013 sebagai berikut.

	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
1) Belanja Operasi	83.866.694.215,00	43.598.343.181,00

Belanja Operasi SKPD Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2013 Rp. 83.866.694.215,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
(a)	Belanja Pegawai	8.865.906.495,00	8.802.164.348	8.541.452.372,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa	72.153.247.236,00	75.064.529.867,00	35.056.890.809,00
Jumlah		81.019.153.731,00	83.866.694.215,00	43.598.343.181,00

Selanjutnya Belanja Operasi SKPD Dinas Pu Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar realisasi tahun 2013 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

No	Belanja Operasi	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai	8.027.346.495,00	7.993.990.348,00	8.056.630.372,00
	Gaji dan Tunjangan	7.743.041.800,00	7.728.435.653,00	7.780.370.372,00
	Tambahan Penghasilan PNS	271.800.000,00	253.050.000,00	265.950.000,00
	Intensif pemungutan retribusi Daerah	12.504.695,00	12.504.695,00	10.310.000,00
1.	Jumlah Belanja Tak Langsung (1)	8.027.346.495,00	7.993.990.348,00	8.056.630.372,00
	Belanja Langsung			
	Belanja Pegawai	838.560.000,00	808.174.000,00	484.822.000,00
	Honorarium PNS	826.560.000,00	796.460.000,00	340.920.000,00
	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	136.944.000,00
	Uang Lembur PNS	12.000.000,00	11.714.000,00	6.958.000,00
	Belanja Barang/Jasa	72.153.247.236,00	75.064.529.867,00	35.056.890.809
	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	114.969.400,00	109.263.700,00	127.370.200,00
	Belanja Bahan/Material	637.205.000,00	634.810.700,00	709.898.000,00
	Belanja Jasa Kantor	457.534.000,00	452.346.317,00	44.546.227,00
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.345.000,00	37.718.000,00	135.035.000,00
	Belanja Cetak dan Penggandaan	219.654.836,00	216.174.250,00	133.690.100,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	51.643.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman	59.380.000,00	58.560.000,00	88.123.000,00
	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	675.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	370.320.000,00	351.374.000,00	335.215.000,00
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	88.245.000,00	87.153.500,00	28.943.000,00
	Belanja Pemeliharaan	417.390.000,00	4.339.524.400,00	2.192.008.000,00
	Belanja jasa konsultasi	487.350.000,00	482.141.000,00	129.448.000,00
	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	69.260.854.000,00	68.295.464.000,00	31.080.296.282,00
2.	Jumlah Belanja Langsung (2)	72.153.247.236,00	75.064.529.867,00	35.056.890.809,00
	Jumlah 1 dan 2	81.019.153.731,00	83.866.694.215,00	43.598.343.181,00

*.Belanja pemeliharaan realisasi melampaui jumlah anggaran karena adanya pergeseran Anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No 41 Tahun 2013 Tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2013

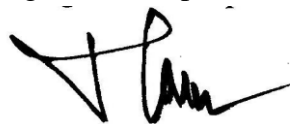
	<u>31 Desember 2013</u> (Rp)	<u>31 Desember 2012</u> (Rp)
2) Belanja Modal	130.106.045.870,00	85.981.246.255,00

Belanja Modal SKPD Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi tahun 2013 Rp. 130.106.045.870,00 dengan rincian sebagai berikut

No	Belanja Modal	Anggaran 2013 (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2013	2012
1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah			
	Belanja Modal Pengadaan Tanah	378.000.000,00	305.906.700,00	0,00
	Jumlah 1	378.000.000,00	305.906.700,00	0,00
2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin			
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	1.100.000.000 ,00	1.097.394.075,00	0,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.206.075.000,00	1.159.846.995 ,00	1.736.856.300,00
	Belanja Modal Pengadaan Komputer	147.077.000,00	144.165.000,00	119.092.000,00
	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	49.610.000,00	49.610.000,00	109.839.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	38.500.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	18.500.000,00	18.040.000,00	52.268.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9.500.000,00	9.240.000,00	,00
	Jumlah 2	2.908.762.000,00	2.478.296.070,00	2.056.555.300,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	83.365.443.180,00	82.510.712.6000,00	53.958.863.770,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.430.000.000,00	3.393.803.200,00	3.632.368.9250,00
	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	28.334.877.250,00	35.674.005.300,00	22.275.879.460,00
	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.875.000.000,00	5.743.322.000,00	3.787.267.8000,00
	Jumlah 4	123.914.082.430,00	130.106.045.870,00	85.981.246.255,00
	Total Belanja Modal	123.914.082.430,00	130.106.045.870,00	85.981.246.255,00

- Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air realisasi melampaui jumlah anggaran karena adanya pergeseran Anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No 41 Tahun 2013 Tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2013
- Realisasi Belanja Modal 130.106.045.870 berasal dari Belanja yang terdiri dari Belanja Tanah Rp. 305.906.700 Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 2.478.296.070,00 dan Belanja Aset jalan, jaringan dan irigasi Rp. 127.321.843.100,00

Blitar, 31 Desember 2013
Kepala SKPD Dinas PU Bina Marga dan
Pengairan Kabupaten Blitar



Ir. HARPRIYANTO NUGROHO, MM

NIP. 19601127 199202 1 001